



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



Kebijakan Pengadaan ASN 2021

Teguh Widjinarko
Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur
Kementerian PANRB

Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan CASN tahun 2021

Jakarta, 3 Maret 2021



1. KEBIJAKAN PENGADAAN ASN
2. MEKANISME PENGADAAN ASN
3. TIM PANSELNAS 2021
4. PROGRES PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN 2021
5. PENUTUP

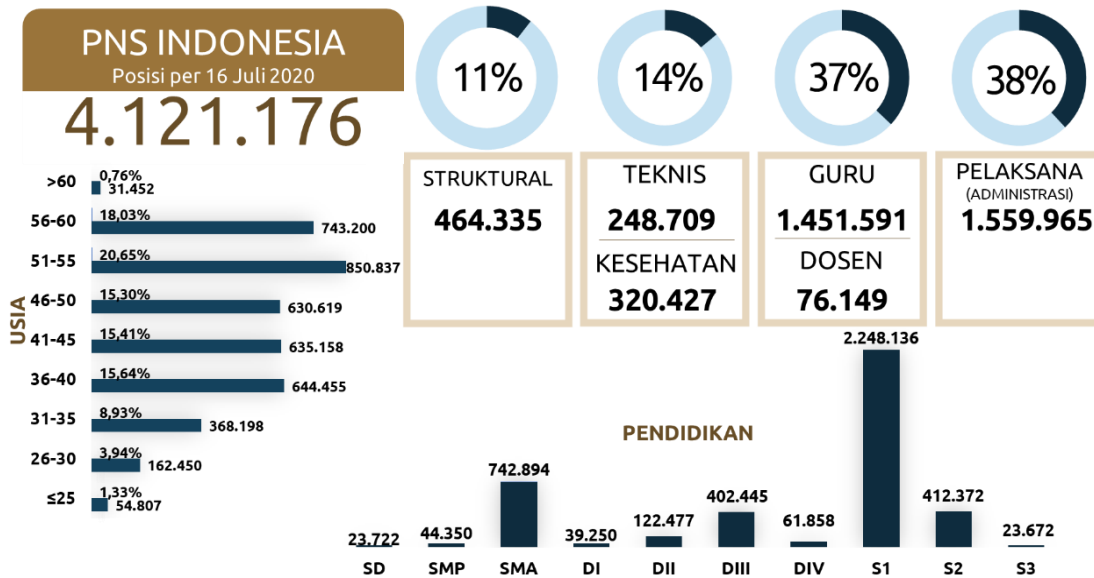
OUTLINE

KONDISI ASN SAAT INI

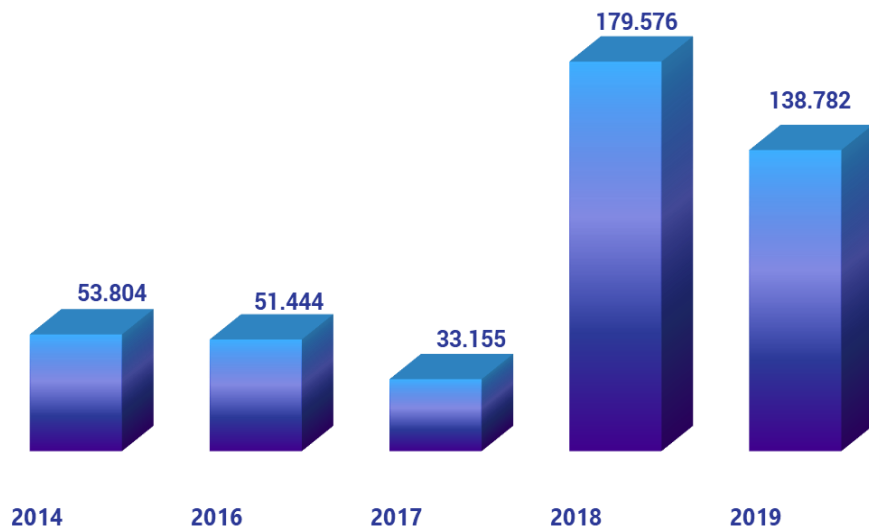
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



KOMPOSISI ASN

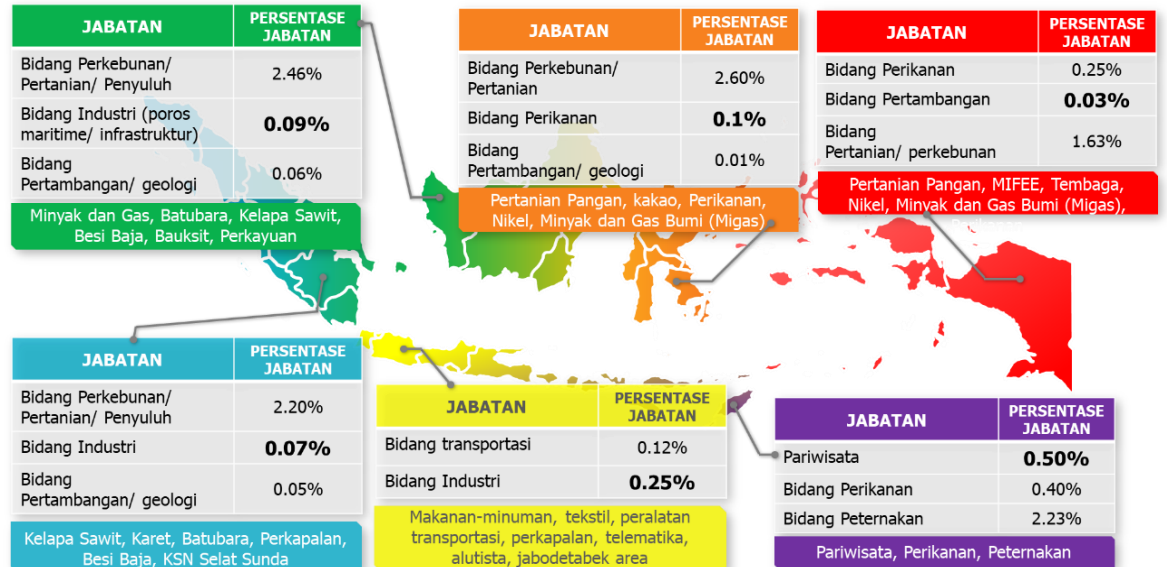


REKRUTMEN CPNS 2014-2019

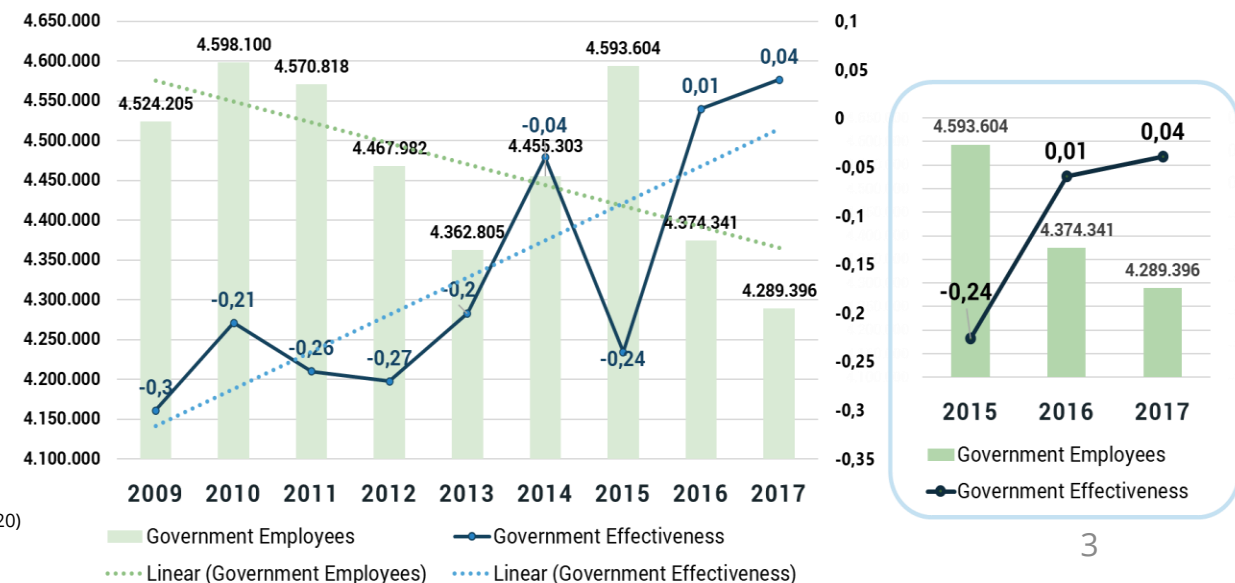


Sumber:
Kementerian PANRB (2017-2020)
BKN (2019-2020)
World Bank (2019)
"diolah"

MISMATCH SDM ASN DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL



INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN JUMLAH ASN 2009-2017



ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



GOOD
GOVERNANCE

RPJM 1 (2005-2009)



REFORMASI
BIROKRASI

RPJM 2 (2010-2014)



SISTEM MERIT

RPJM 3 (2015-2019)



BIROKRASI
BERKELAS DUNIA 2024

RPJM 4 (2020-2024)

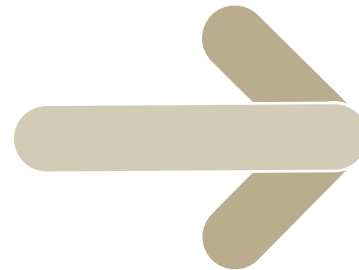


SMART ASN 2024

INTEGRITAS

- NASIONALISME
- PROFESIONALISME
- WAWASAN GLOBAL
- IT & BAHASA ASING
- HOSPITALITY
- NETWORKING
- ENTREPRENEURSHIP

profil



APARATUR SIPIL NEGARA MELIPUTI PNS DAN PPPK

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS



PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK

PNS & PPPK:

- MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN
- MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN

KEBIJAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN



PENENETAPAN KEBUTUHAN ASN

CPNS

PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8

Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan:

- Analisis jabatan
- Analisis beban kerja
- Peta jabatan
- Memperhatikan:
 - kondisi geografis daerah
 - jumlah penduduk
 - anggaran belanja pegawai

PPPK

PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK

- Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
- Untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun
- Satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS
- Ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB

PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 5

PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri PANRB kebutuhan JPT utama/madya tertentu untuk PPPK.

PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8
PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4

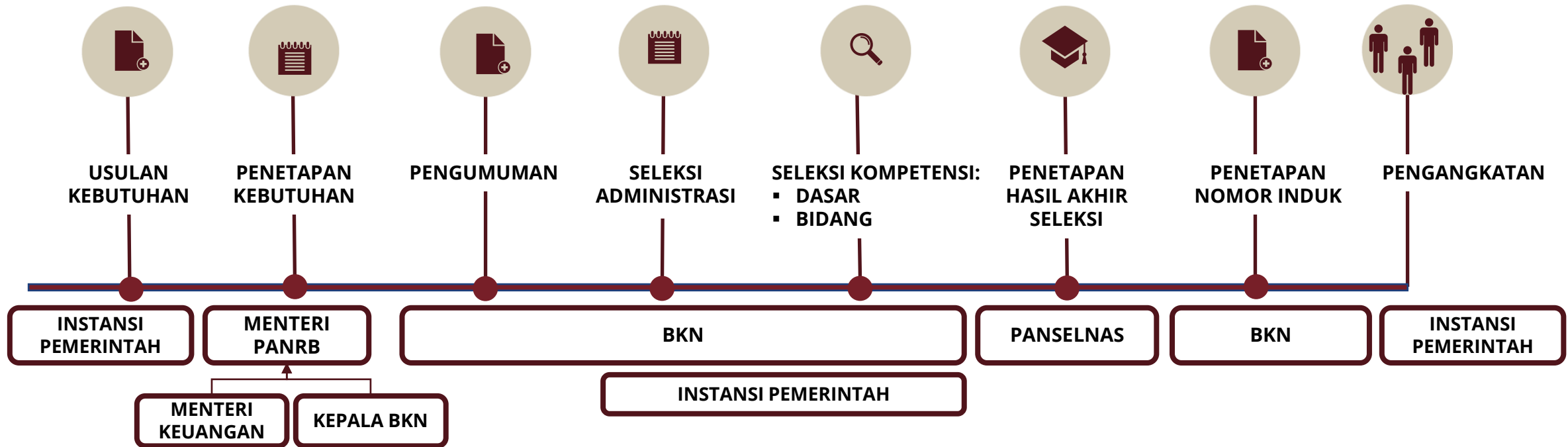
Kebutuhan ASN (PNS/PPPK) secara nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun, memperhatikan:

- Pendapat Menteri Keuangan
- Pertimbangan teknis Kepala BKN

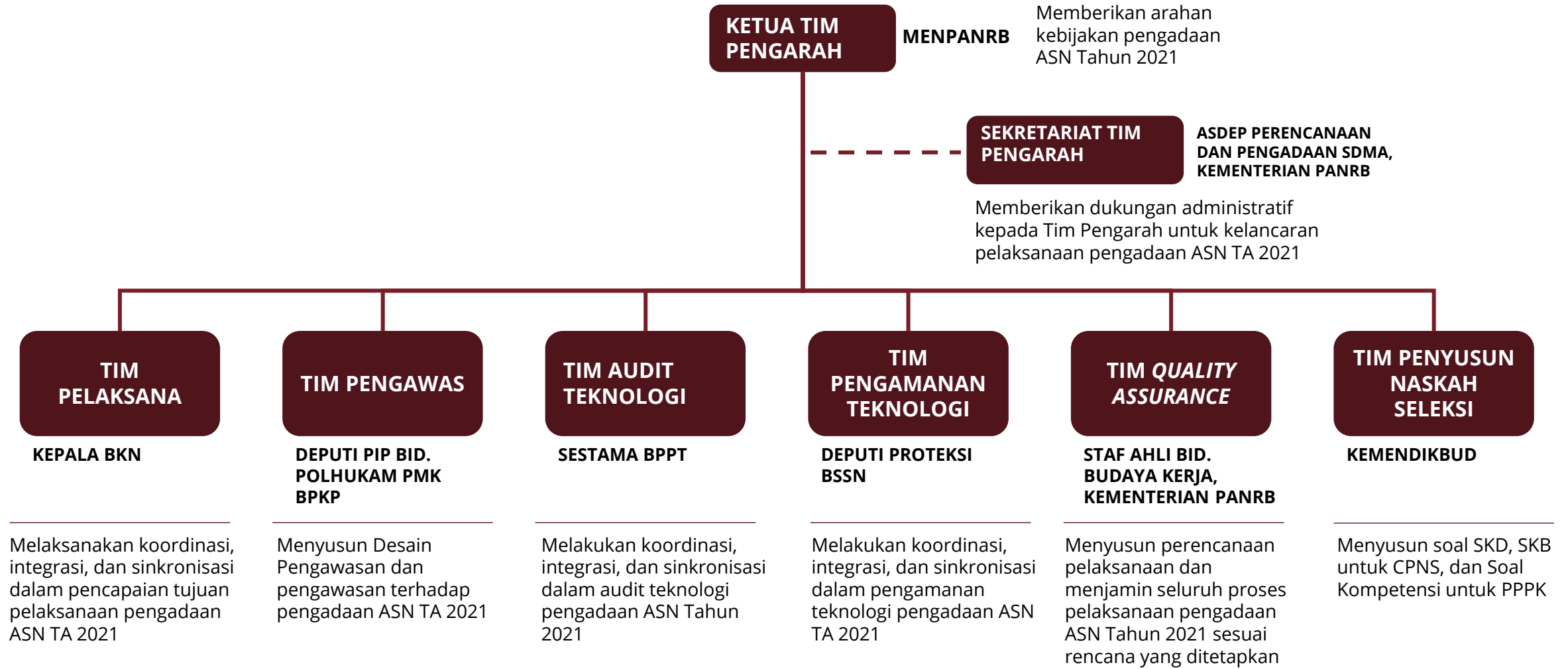
MEKANISME PENGADAAN ASN



Analisis Jabatan
Analisis Beban Kerja



TIM PANSELNAS 2021



STATUS PENGUSULAN KEBUTUHAN ASN 2021



34 Instansi

TIDAK USUL

23 Kementerian/Lembaga

1 Pemerintah Provinsi

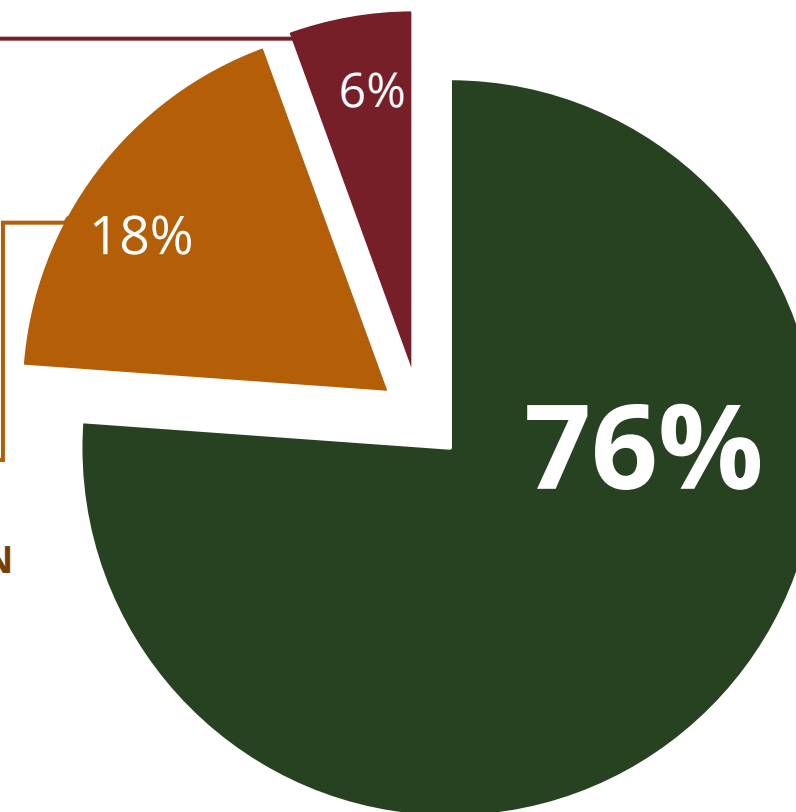
10 Pemerintah Kabupaten/Kota

122 Instansi

SUDAH/AKAN USUL NAMUN PERLU MELENGKAPI DOKUMEN

10 Pemerintah Provinsi

112 Pemerintah Kabupaten/Kota



466 Instansi

SUDAH USUL DAN DOKUMEN LENGKAP

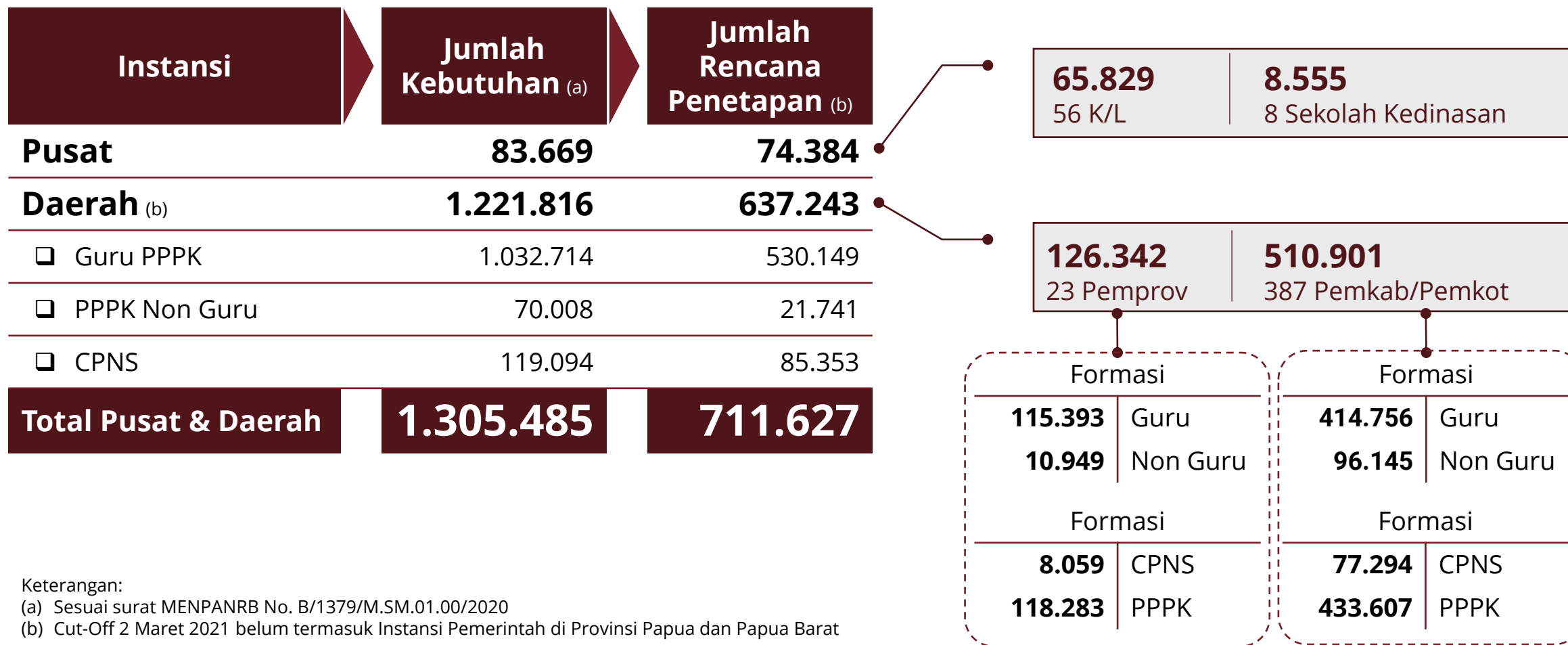
56 Kementerian/Lembaga

23 Pemerintah Provinsi

387 Pemerintah Kabupaten/Kota

Keterangan:
Cut-Off 2 Maret 2021

RENCANA PENETAPAN KEBUTUHAN ASN 2021



Keterangan:

(a) Sesuai surat MENPANRB No. B/1379/M.SM.01.00/2020

(b) Cut-Off 2 Maret 2021 belum termasuk Instansi Pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat

RENCANA JADWAL (TENTATIVE)

SELEKSI CASN TAHUN 2021

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



No	Kegiatan	2021										2022	Ket
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	
SEKOLAH KEDINASAN													
1	Penyampaian formasi ke K/L	minggu 2											MENPANRB
2	Pendaftaran		9-30 April										8 K/L
3	Seleksi			minggu 3	minggu 4								CAT BKN
4	Pengumuman kelulusan												8 K/L
CPNS DAN PPPK (NON GURU)													
1	Penyampaian formasi ke K/L Pemda	minggu 3											MENPANRB
2	Pendaftaran												SSCASN BKN
3	Seleksi												CAT BKN
4	Pengumuman kelulusan												K/L/Pemda
5	Pemberkasan dan Penetapan NIP												BKN
PPPK (GURU)													
1	Penyampaian formasi ke Pemda	minggu 3											MENPANRB
2	Pendaftaran												SSCASN BKN
3	Seleksi (Tahap I)												CAT UNBK
4	Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP												BKN
5	Seleksi (Tahap II)												CAT UNBK
6	Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP												BKN
7	Seleksi (Tahap III)												CAT UNBK
8	Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP												BKN



1. Akhir Maret 2021, formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK K/L/D.
2. Instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan.
3. Kementerian PANRB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021.
4. Instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya.
5. Untuk pelaksanaan Seleksi ASN:
 - Non Guru akan menggunakan Sistem CAT BKN
 - Guru akan menggunakan Sistem UNBK Kemendikbud.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



[kempnrb](#)



[kemenpanrb](#)



[Kementerian-PANRB](#)

DISCLAIMER:

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.